



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SITI ROMLAH HUMAIDY**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **106177**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 3.122.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/132 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/150 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/70 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
5. Tanah Seluas 311 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 622.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 676.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 200.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.300.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	118.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.003.169.987
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.919.669.987
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.919.669.987

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.